

ANALISIS POTENSI EKONOMI PROVINSI SULAWESI SELATAN SEBAGAI DAERAH PENYANGGA DALAM PEMBANGUNAN IBUKOTA NEGARA (NUSANTARA)

Anindita Primastuti¹, Afif Syarifudin Yahya², Afni Nooraini³,
Alma'arif⁴, Murtir Jeddawi⁵

^{1,2,3,4,5}Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jl. Ir. Soekarno, Km. 20 Jatinangor, 456363
Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia

E-mail: anindita@ipdn.ac.id; afifsyarifudinyahya@ipdn.ac.id; afifnooraini@ipdn.ac.id;
almaarif@ipdn.ac.id; murtirjeddawi@ipdn.ac.id

ABSTRAK. Kebijakan pemindahan Ibukota Negara Indonesia dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur sejak tahun 2021 diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia secara umum dan daerah penyangga secara khusus. Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Parepare adalah daerah penyangga yang berbatasan laut dengan Ibukota Nusantara. Sebagai daerah penyangga dan menjadi daerah penyupai utama makanan dan kebutuhan di Kalimantan Timur sebelum adanya IKN, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Parepare harus menyiapkan perangkat kebijakan dan memaksimalkan potensi ekonomi yang dimilikinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi, dan *focus group discussion* (FGD). Adapun informan dalam penelitian ini adalah perangkat daerah dan pakar yang memiliki hubungan fungsional dengan kebijakan pembangunan dan potensi daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Daerah Kota Parepare. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Parepare memiliki potensi ekonomi yang besar sebagai daerah penyangga IKN. Sementara dari segi kesiapan kebijakan, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Parepare tidak menempatkan kebijakan khusus dalam rangka mengantisipasi kebijakan pemindahan ibukota, melainkan kebijakan pembangunan daerah yang ada saat ini dimaksimalkan untuk kepentingan internal daerah.

Kata Kunci: Pemindahan Ibukota; Potensi Ekonomi; Perencanaan Pembangunan Daerah; Kebijakan Pemerintah Daerah.

ANALYSIS OF THE ECONOMIC POTENTIAL OF SOUTH SULAWESI PROVINCE AS BUFFER AREA IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL CAPITAL (NUSANTARA)

ABSTRACT. The policy of relocating Indonesia's capital from Jakarta to North Penajam Paser, East Kalimantan, beginning in 2021, is projected to establish a new center of economic growth in Indonesia, particularly in buffer areas. South Sulawesi Province and Parepare City serve as buffer regions between the sea and the archipelago's capital. As a buffer zone and the primary source of food and essentials in East Kalimantan prior to the IKN, South Sulawesi Province and Parepare City must develop policy tools and maximize their economic potential. This study employs a qualitative approach with data collection methods including interviews, documentation, and focus group discussions (FGD). The informants in this study include regional authorities and specialists with a functional relationship to development policies and regional potential within the context of the South Sulawesi Provincial Government and the Parepare City Regional Government. The study's findings indicate that South Sulawesi Province and Parepare City have significant economic potential as IKN buffer zones. Meanwhile, in terms of policy readiness, South Sulawesi Province and Parepare City have not implemented specific policies to anticipate the policy of capital movement; instead, existing regional development policies are being utilized for the region's domestic interests.

Keywords: Capital Relocation; Economic Potential; Local Development Planning; Local Policy.

PENDAHULUAN

Ibu Kota Negara merupakan pusat pemerintahan sehingga dirancang sebagai pusat perkantoran dan tempat berkumpulnya para pimpinan pemerintahan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ibu Kota Negara juga

berkedudukan sebagai kantor perwakilan negara asing dan lembaga asing sehingga perlu perhatian khusus pada aspek pertahanan dan pengamanan (Saraswati & Adi, 2022). Selain itu juga memperhatikan aspek geopolitik dan geostrategi nasional agar terjamin stabilitas politik nasional (Ismanto et al., 2022).

Ibu Kota Negara Indonesia telah beberapa kali di pindah. Selain Jakarta, beberapa lokasi yang pernah menjadi Ibu Kota Negara antara lain Yogyakarta, Bukittinggi, dan Bireuen (Hutasoit, 2018). Presiden Joko Widodo mengumumkan secara resmi kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara ke Pulau Kalimantan pada Sidang Paripurna tanggal 26 Agustus 2019 (Humas Sekretariat Negara, 2019). Kebijakan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Presiden terkait Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara kepada Ketua DPR pada tanggal 29 September 2021 (Putra, 2021). Setelah melalui tahapan pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat pada akhirnya Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 15 Februari 2022 (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, 2022). Kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara merupakan bagian dari transformasi Negara Indonesia yang lebih kompetitif dan mewujudkan kehidupan sosial yang lebih adil (Humas Ibu Kota Negara, 2022). Kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara dinilai sebagai solusi atas permasalahan yang terjadi di Ibu Kota Negara saat ini yakni Provinsi DKI Jakarta sekaligus sebagai upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud yakni terkait dengan permasalahan urbanisasi, transportasi, keamanan, lingkungan, pengelolaan Kawasan khusus dan masalah sosial kemasyarakatan (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2021). Jika tidak dilakukan pemindahan Ibu Kota Negara maka beban dan permasalahan bagi Provinsi DKI Jakarta akan semakin berat, sudah melewati daya tampung dan daya dukung (Riyandi, 2022).

Ibu Kota Negara secara legal dipindah dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 pada tanggal 15 Februari 2022. Ibu Kota Negara bernama Nusantara yang dikelola oleh Otorita Ibu Kota Nusantara yang merupakan Lembaga setingkat kementerian (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, 2022). Lokasi

perpindahan Ibu Kota Negara terletak pada wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur yang dipilih melalui berbagai pertimbangan. Berdasarkan penyampaian Presiden dalam konperensi pers pada tanggal 26 Agustus 2019 di Istana Negara bahwa terdapat 5 (lima) pertimbangan mengapa lokasi ini dipilih yakni: minim resiko bencana, lokasinya strategis karena berada di tengah Indonesia, berbatasan dengan perkotaan yang sudah berkembang, kondisi infrastruktur cukup lengkap, dan sudah ada lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180.000 hektar (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2019).

Pemindahan Ibu Kota Negara ke wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur seyogyanya juga memperhatikan aspek geopolitik dan geostrategi nasional (Ismanto et al., 2022). Aspek geopolitik menekankan geografi sebagai faktor dominan yang mempengaruhi identitas dan hubungan interaksi dengan negara lain. Sifat dari geopolitik tidak hanya progresif tetapi juga akumulatif (Anggoro, 2017). Sedangkan aspek geostrategi menekankan pada berbagai aspek yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal pasca pemindahan Ibu Kota Negara. Aspek geostrategi sebagaimana dimaksud sangat luas mencakup ideologi, pertahanan, keamanan, politik, geografi, demografi, ekonomi, kekayaan alam, sosial, budaya, keadaan regional, serta global. Oleh karena itu perlu upaya antisipasi untuk mengamankan aspek geostrategi Indonesia dalam dinamika politik regional dan global sehingga kepentingan nasional dapat dilindungi dan tujuan nasional dapat terwujud (Mulyono, 2017).

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara bukanlah pekerjaan yang mudah, tidak selamanya berhasil dan membutuhkan waktu yang lama. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Negara yang berhasil melakukan relokasi Ibu Kota Negara antara lain yakni Amerika Serikat (dari New York ke Washington DC tahun 1800), Kanada (dari

Toronto ke Ottawa tahun 1857), Australia (dari Melbourne ke Canberra tahun 1927). Negara yang relatif berhasil melakukan relokasi Ibu Kota Negara yakni Nigeria (dari Lagos ke Abuja tahun 1991), dan Myanmar (dari Yangon ke Naypyidaw tahun 2005). Negara yang masih dalam proses penyelesaian relokasi Ibu Kota Negara yakni Sudan Selatan (dari Juba ke Ramciel tahun 2011). Negara yang kurang berhasil dalam relokasi Ibu Kota Negara yakni Laos (dari Luang Prabang ke Vientiane tahun 1975), dan Bhutan (dari Punakha ke Thimpu tahun 1907). Negara yang gagal melakukan relokasi Ibu Kota Negara yakni: Tanzania (dari Dodoma ke Dar es Saalam tahun 1970), dan Botswana (dari Mafeking ke Gaborone tahun 1965) (Aziz, 2019). Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa sudah ada penelitian yang memfokuskan tingkat keberhasilan pemindahan ibu kota dari lokasi lama ke lokasi ibu kota baru.

Penelitian lain menunjukkan bahwa pemindahan Ibu Kota Negara mempunyai dampak positif maupun negatif. Penelitian yang dilakukan oleh Kodir (Kodir et al., 2021) menunjukkan bahwa terdapat tiga bentuk respon terhadap dinamika perkembangan IKN di Kalimantan Timur. 1) Mereka yang menerima pembangunan IKN, kelompok ini optimistis keberadaan IKN akan membawa persoalan sosial ekonomi perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik. 2) Sebagian besar pihak yang menolak pengembangan IKN terdiri dari masyarakat adat dan beberapa LSM di Kalimantan Timur. Alasan penolakan adalah kekhawatiran tentang tanah masyarakat adat di lokasi pembangunan. 3) Sedang atau partai kelas menengah: partai/kelompok ini memandang perkembangan IKN dari dua sisi. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Hasibuan (Hasibuan & Aisa, 2020) yang menunjukkan bahwa ada potensi peningkatan PDB dengan tingkat inflasi yang terkendali sebagai dampak perpindahan Ibu Kota Negara, akan tetapi Pemerintah juga perlu memperhatikan skema kerja sama dengan swasta dalam pembangunan infrastruktur. Penelitian lain juga dilakukan oleh Djayanti (Djayanti et al., 2022) yang menunjukkan bahwa pemindahan Ibukota Negara mengakibatkan konflik sosial yang

disebabkan adanya perubahan dan pemenuhan kebutuhan hidup. Beberapa penelitian terdahulu memotret keterkaitan Pembangunan ibukota dengan daerah penyangga dari aspek dampak ekonominya, tetapi masih sedikit yang melihat kesiapan daerah penyangga dalam Pembangunan ibukota, khususnya terhadap daerah yang berbatasan laut.

Pemindahan Ibu Kota Negara merupakan proses yang panjang. Terdapat berbagai kebutuhan guna mensukseskan pembangunan Ibu Kota Negara. Berdasarkan penjelasan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa dibutuhkan dana sebesar Rp466,06 Triliun untuk pembiayaan pembangunan fisik, dan sebesar Rp 0,92 Triliun untuk pembiayaan non fisik (Daus, 2023). Dalam pembangunan fisik, dibutuhkan berbagai materil baik berupa *raw material* maupun *direct material*, selain itu juga membutuhkan tenaga kerja. Berdasarkan data dari Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bahwa dalam pembangunan Ibu Kota Negara hingga selesai dibutuhkan tenaga kerja konstruksi (TKK) mencapai 1,14 juta orang. Dalam periode tahun 2022-2024 dibutuhkan tenaga kerja konstruksi sekitar 260.000 orang (Triyatna, 2022). Kemudian untuk bahan bangunan bahwa berdasarkan penjelasan Direktur Utama PT. Semen Indonesia bahwa kebutuhan semen untuk pembangunan Ibu Kota Negara selama 20 tahun adalah sebesar 21 juta ton semen (Fadli & Alexander, 2022). Selanjutnya kebutuhan baja sekitar 9,3 juta Ton (Fauzan, 2022).

Dalam proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Ibu Kota Negara juga dibutuhkan berbagai bahan pangan guna memenuhi kebutuhan pangan bagi pekerja dan penduduk. Berdasarkan dokumen perencanaan Ibu Kota Negara sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Edaran Nomor: 01/SE/Kepala-Otorita IKN/X/2022 bahwa pada tahap awal pemindahan IKN periode 2022-2024 jumlah penduduk yang menempati wilayah Ibu Kota Negara sebanyak 488.409 jiwa. Kemudian pada periode berikutnya tahun 2025-2029 jumlah penduduk meningkat menjadi 1,28 juta

jiwa. Pada periode tahun 2030-2034 bertambah menjadi 1,45 juta jiwa. Pada periode tahun 2035-2039 bertambah menjadi 1,67 juta jiwa. Terakhir pada periode 2040-2045 diproyeksikan penduduk yang tinggal di wilayah Ibu Kota Negara (Nusantara) mencapai 1,91 juta jiwa yang terdiri dari tenaga kerja, populasi tanggungan, dan penduduk eksisting (Pratiwi, 2023). Berbagai kebutuhan tersebut dapat menjadi peluang bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk memenuhinya, mengingat lokasi Provinsi Sulawesi Selatan yang berbatasan dengan Ibu Kota Negara.

Provinsi Sulawesi Selatan menjadi salah satu daerah penyangga yang berbatasan secara langsung dengan Provinsi Kalimantan Timur yang dipisahkan oleh Selat Makassar. Oleh sebab itu, Provinsi Sulawesi Selatan secara langsung dan tidak langsung akan menerima dampak perpindahan Ibu Kota Negara tersebut. Tersedianya akses transportasi dari Provinsi Sulawesi Selatan ke Ibu Kota Negara diprediksi dapat mempengaruhi perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan, seperti jalur udara (penerbangan beberapa maskapai, Garuda Indonesia, Batik Air, dan 3 jenis lainnya), jalur laut (Pelabuhan Soekarno Hatta, Pelabuhan Paotere, Pelabuhan Pare-Pare, Pelabuhan Malili, dan 14 pelabuhan lainnya). Provinsi Sulawesi Selatan juga memiliki 2 pabrik semen (PT Tonasa dan PT Semen Bosowa). PT Semen Tonasa tersebut menjadi yang terbesar di Kawasan timur Indonesia, sedangkan PT Semen Bosowa adalah grup semen swasta terbesar keempat di Indonesia. Pada Bidang ketenagakerjaan juga akan diuntungkan, karena saat ini masih terdapat 5,26% pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan, atau sekitar 239.589 orang.

Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu daerah penyangga ibu kota negara seyogyanya dapat memanfaatkan kebijakan pemindahan ibu kota negara untuk membangun daerahnya, baik itu melalui pemenuhan material semen dan tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan sempat mengalami penurunan saat terjadi pandemi covid-19. Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 mengalami penurunan jika

dibandingkan dengan kondisi tahun 2018. Pada tahun 2018 laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 7.04 sedangkan pada tahun 2022 laju pertumbuhan ekonomi yaitu 5.09. Sudah menunjukkan perbaikan pasca terjadinya Covid-19. Kontribusi perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan didominasi oleh Kota Makassar sebesar 34.47% (tiga puluh empat koma empat puluh tujuh persen), sedangkan kabupaten/kota lainnya hanya berkontribusi antara 1%-7% (satu persen hingga tujuh persen).

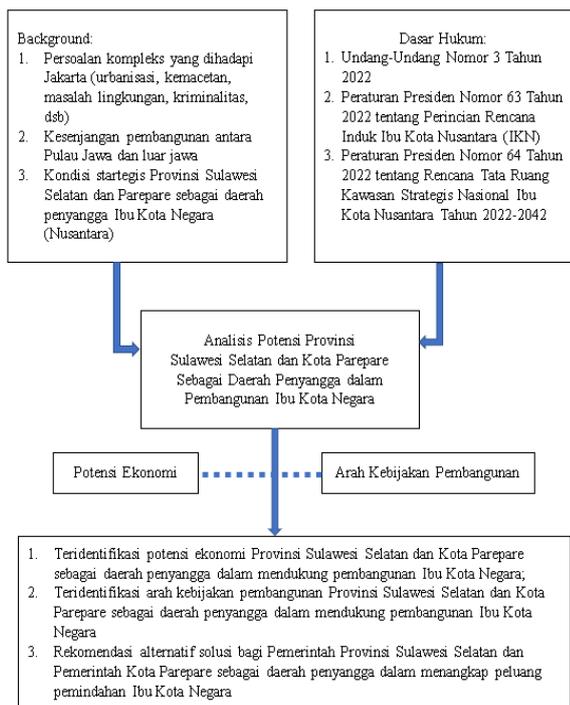
Berdasarkan fenomena tersebut, maka penelitian terkait dengan kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara terhadap daerah penyangga sangat menarik untuk dilakukan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk 1) Menganalisis potensi ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan sebagai daerah penyangga Ibu Kota Negara; 2) Menganalisis kesiapan kebijakan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Daerah Penyangga dalam pembangunan Ibu Kota Negara.

KERANGKA PEMIKIRAN

Ibu Kota Negara Indonesia saat ini yaitu Jakarta memiliki beban yang berat, semenjak DKI Jakarta ditetapkan menjadi Ibu Kota Negara 62 tahun lalu. Jakarta menghadapi beragam permasalahan yang berkepanjangan, seperti urbanisasi, kemacetan, banjir, kejahatan/kriminalitas, masalah lingkungan (krisis air bersih, sampah), pengangguran, tata ruang buruk, dan lain sebagainya. Hal inilah yang mendasari pemerintah untuk mengambil kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara. Pemerintah kemudian menerbitkan beberapa peraturan pendukung yang dijadikan pedoman dalam perencanaan dan pengelolaan Ibu Kota Negara ini yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (IKN), dan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan

Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042.

Berdasarkan fenomena tersebut, perlu dilakukan penelitian terkait potensi yang ada dari dipindahkannya Ibu Kota Negara Indonesia tersebut terhadap bidang ekonomi dan kebijakan pembangunan pada daerah penyangga IKN, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Parepare. Penelitian ini diharapkan mampu mendeteksi berbagai dampak baik positif maupun negatif yang muncul sebagai akibat dilakukan pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia yang semula berada di Provinsi DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur, khususnya bagi Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Parepare serta merumuskan rekomendasi solusi atau saran dalam menghadapi berbagai dampak tersebut. Kerangka pemikiran ini kemudian peneliti ilustrasikan dalam gambar 1 berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran
Sumber: diolah oleh peneliti, 2023

METODE

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan secara kualitatif dengan menggunakan Teknik wawancara, dokumentasi dan *focus group discussion* (FGD) yang dilakukan di Pemerintah Provinsi Sulawesi

Selatan dan Pemerintah Kota Parepare Adapun informan dan narasumber dari penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Informan Penelitian

Informan
Kepala Bidang Pembangunan Daerah, Bappeda Provinsi Sulawesi selatan
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan
Sekretaris Tim TGUPP Provinsi Sulawesi Selatan
Kepala Bappeda Kota Parepare
Kepala Bidang Pendapatan Daerah, Bapenda Kota Parepare
Kepala Ops Pelabuhan Nusantara I Parepare

Sumber: diolah oleh peneliti, 2023

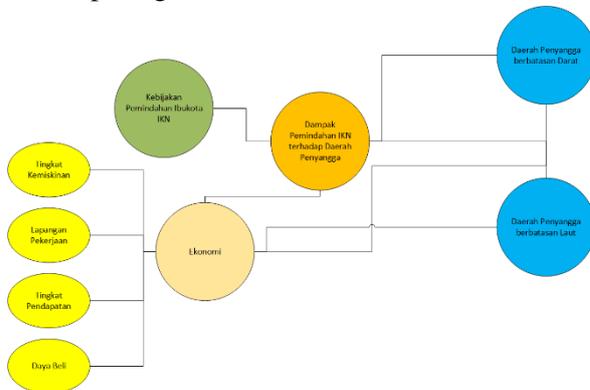
Tabel 2. Peserta FGD

Peserta FGD Provinsi Sulawesi Selatan
Kepala Bidang Pembangunan Daerah, Bappeda Provinsi Sulawesi selatan
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan
Sekretaris Tim TGUPP Provinsi Sulawesi Selatan
Perwakilan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan
Perwakilan Bapenda Provinsi Sulawesi Selatan
Kepala Dishub Provinsi Sulawesi Selatan
Staf Khusus Gubernur bidang Perekonomian
Perwakilan DKOPUKM Provinsi Sulawesi Selatan
FGD Kota Parepare
Sekretaris Daerah Kota Parepare
Kepala Bappeda Kota Parepare
Kepala Bidang Pendapatan Daerah, Bapenda Kota Parepare
Kepala Ops Pelabuhan Nusantara I Parepare
Perwakilan dari BPKAD Kota Parepare
Kepala Bagian Kesra Kota Parepare
Perwakilan Bagian Ekonomi dan Adbang Kota Parepare

Sumber: diolah oleh peneliti, 2023.

Data yang diperoleh kemudian dilakukan analisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik pengkodean data (coding) secara berjenjang yaitu pengkodean terbuka, pengkodean awal, pengkodean selektif untuk

menghasilkan tema (Saldaña, 2009). Kerangka konseptual dalam penelitian kualitatif biasa juga diistilahkan dengan peta konsep (*concept map*) (Maxwell, 2012) yang bertujuan melihat keterkaitan antara satu konsep dengan konsep lain dalam satu fokus penelitian. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2 berikut:



Gambar 2. Kerangka Konseptual Penelitian
Sumber: diolah oleh peneliti, 2023

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Potensi Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Daerah Penyangga Ibukota Negara

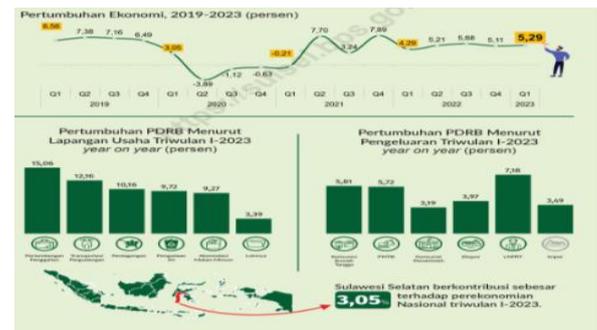
Provinsi Sulawesi Selatan memiliki banyak potensi yang dapat menyokong Ibukota Nusantara, salah satunya adalah potensi ekonomi. Potensi ekonomi ini dapat dilihat atau diukur dari beberapa hal antara lain:

a. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan

Menurut Prof. Simon Kuznets dikutip Jhingan (2013, p. 32), mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kemampuan suatu negara untuk menyediakan pelbagai jenis barang ekonomi yang dibutuhkan oleh penduduk negara tersebut dalam jangka panjang. Kemampuan tersebut meningkat seiring dengan kemajuan teknologi, penyesuaian kelambagaan dan ideologi yang diperlukan negara tersebut.

Definisi ini mempunyai 3 (tiga) komponen yaitu: kesatu, pertumbuhan ekonomi suatu negara terlihat dari meningkatnya persediaan barang-barang secara terus-menerus (berkelanjutan); kedua, kemajuan teknologi merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan dapat

menjadi penentu derajat/tingkat pertumbuhan kemampuan suatu negara dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk; ketiga, pemanfaatan teknologi secara luas dan agar menjadi efisien memerlukan penyesuaian di bidang kelembagaan dan penyesuaian ideologi, sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan dapat dimanfaatkan secara tepat oleh umat manusia (Jhingan, 2000:57).



Gambar 3. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan

Sumber: Indikator Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan 2023

Gambar 3 menunjukkan perekonomian Sulawesi Selatan pada triwulan I tahun 2023 tumbuh sebesar 5,29% (dibandingkan periode yang sama tahun lalu), angka tersebut meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yaitu triwulan III tahun 2022 sebesar 5,11% (dibandingkan triwulan yang sama pada tahun lalu). Hasil wawancara menunjukkan bahwa peningkatan tersebut disebabkan oleh menguatnya permintaan domestik, membaiknya aktivitas perekonomian masyarakat pasca penghapusan kebijakan Pembatasan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, dan kebutuhan Masyarakat untuk merayakan hari besar keagamaan nasional (Ramadhan) mulai Maret 2023 meningkat.

Dari sisi belanja atau pengeluaran, pertumbuhan ekonomi tahunan pada triwulan I-2023 ditopang oleh peningkatan konsumsi domestik, baik dari sektor swasta maupun pemerintah. Kondisi tersebut sejalan dengan periode Ramadan yang akan dimulai pada triwulan I tahun 2023. Selain itu, investasi yang dibuktikan dengan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga mengalami peningkatan, baik pada sektor real estate maupun non real

estate. menginvestasikan. Hal ini terkonfirmasi dengan meningkatnya belanja modal masyarakat dan impor barang modal dibandingkan triwulan sebelumnya.

Dari sisi penawaran, perbaikan perekonomian Sulsel pada triwulan I tahun 2023 terutama didorong oleh kinerja pertambangan dan penggalian LU seiring dengan peningkatan hasil pertambangan. Selain itu, sektor konstruksi LU serta sektor grosir (perdagangan besar) dan eceran LU juga mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya, berkat kinerja investasi yang lebih tinggi dan menguatnya permintaan dalam negeri. Di sisi lain, aktivitas LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, serta LU Industri mengalami penurunan laju (melambat).

Pada prinsipnya pertumbuhan ekonomi dapat dipahami sebagai peningkatan pendapatan nasional atau peningkatan output barang dan jasa yang dihasilkan dalam setahun. Jelas bahwa salah satu indikator pertumbuhan ekonomi diwakili oleh nilai PDB (Produk Domestik Bruto) pada tingkat nasional dan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) pada tingkat daerah. PDB merupakan pendapatan nasional riil yang dihitung dari total output barang dan jasa yang diproduksi suatu negara. Syarat suatu negara tumbuh secara ekonomi adalah nilai PDB atau pendapatan nasional riil meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Sedangkan PDRB menggambarkan pendapatan riil suatu daerah berdasarkan total output barang dan jasa yang diproduksi di wilayah tersebut. Suatu daerah dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila nilai PDB atau pendapatan riil daerah tersebut meningkat dibandingkan periode sebelumnya.

Adapun jumlah angka PDRB, Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusinya Menurut Lapangan Usaha dengan Tahun dasar 2010 Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. PDRB, Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusinya Menurut Lapangan Usaha Tahun dasar 2010 Provinsi Sulawesi Selatan 2023

Lapangan Usaha	PDRB (Miliar Rp)		Laju	
	ADHB	ADHK	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Distribusi (%)
A. Pertanian, Kehutanan, Perikanan	133.718,14	71.971,63	2,29	22,10
B. Pertambangan dan Penggalian	30.875,23	17.283,69	0,32	5,10
C. Industri Pengolahan	78.092,71	48.421,55	9,86	12,90
D. Pengadaan Listrik dan Gas	428,38	405,21	14,69	0,07
E. Pengadaan Air	592,23	436,78	6,48	0,10
F. Konstruksi	84.725,07	44.303,91	1,59	14,00
G. Perdagangan Besar dan Eceran	88.596,71	56.510,16	6,55	14,64
H. Transportasi dan Pergudangan	24.131,76	12.111,42	22,33	3,99
I. Akomodasi dan Makan Minum	7.991,81	5.135,60	17,74	1,32
J. Informasi dan Komunikasi	32.345,58	28.966,31	5,25	5,35
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	21.681,00	11.720,73	1,15	3,58
L. Real Estate	21.121,93	12.468,89	3,86	3,49
M.N. Jasa Perusahaan	2.808,55	1.644,24	14,16	0,46
O. Administrasi Pemerintahan	25.330,32	15.132,56	1,99	4,19
P. Jasa Pendidikan	30.606,82	20.750,36	2,83	5,06
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	14.045,50	8.643,79	8,64	2,32
R,S,T,U. Jasa Lainnya	8.052,95	4.967,33	9,56	1,33
PDRB	605.144,68	360.874,18	5,09	100,00
PDB Nasional**)	19.588,45	11.710,40	5,31	

*) Angka Sangat Sementara
**) dalam triliun rupiah

Sumber: Indikator Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan 2023.

Tabel diatas menunjukkan bahwa output terbanyak berdasarkan harga berlaku dan harga konstan dihasilkan oleh komoditi pertanian, perhutanan dan perikanan, yang pada tahun 2023 menghasilkan output senilai Rp. 133.718,14 Miliar berdasarkan harga yang berlaku. Sementara pada urutan kedua penghasil output terbanyak adalah perdagangan besar dan eceran. Komoditas ini menghasilkan output senilai Rupiah 88,596,71 berdasarkan harga yang berlaku.

Pertumbuhan ekonomi yang stabil dan diikuti dengan produksi barang/jasa yang melimpah tentu saja menunjukkan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan mampu menopang Ibukota Negara, bahkan merupakan daerah yang potensial untuk dilakukan kerjasama yang saling menguntungkan.

b. Inflasi yang terkendali

Inflasi adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari karena banyak faktor yang dapat menyebabkan inflasi. Namun demikian inflasi dapat dikendalikan pada rentang nilai yang aman bagi produsen maupun bagi konsumen.

Tabel 4. Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Bulanan Sulawesi Selatan dan Indonesia, 2022 - 2023 (2018=100)

Bulan	IHK				Inflasi M to M ¹⁾			
	2022		2023		2022		2023	
	Sulsel	Nasional	Sulsel	Nasional	Sulsel	Nasional	Sulsel	Nasional
Januari	108,53	108,26	114,86	113,98	0,57	0,56	0,63	0,34
Februari	108,48	108,24	114,61	114,16	-0,04	-0,02	-0,22	0,16
Maret	109,07	108,95	115,46	114,36	0,54	0,66	0,75	0,18
April	110,38	109,98			1,21	0,95		
Mei	110,70	110,42			0,28	0,4		
Juni	111,06	111,09			0,33	0,61		
Juli	112,31	111,80			1,12	0,63		
Agustus	112,00	111,57			-0,27	-0,21		
September	113,25	112,87			1,12	1,17		
Oktober	113,05	112,75			-0,18	-0,11		
November	113,34	112,85			0,25	0,09		
Desember	107,91	107,66	114,14	113,59	0,92	0,57	0,71	0,66

Sumber: Indikator Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan 2023

Pengendalian inflasi pada awal tahun 2023 menghadapi tantangan karena cuaca buruk menghambat produksi pangan, di tengah meningkatnya permintaan dari masyarakat di Sulawesi Selatan dan wilayah lain menjelang dimulainya Ramadhan. Situasi ini menyebabkan inflasi agregat di 5 kota dengan indeks harga konsumen (IHK) Sulawesi Selatan mencapai 5,86% (dibandingkan tahun sebelumnya) pada triwulan I tahun 2023 atau lebih tinggi dibandingkan 5,77% (periode yang sama tahun lalu) pada tahun 2023. triwulan IV tahun 2022. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Selatan menerapkan berbagai strategi pengendalian inflasi melalui pelaksanaan berbagai program yang sejalan dengan kerangka strategis 4K (stabilitas harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif). Upaya tersebut berhasil menurunkan angka inflasi hingga 4,60% (dibandingkan tahun sebelumnya) pada Mei 2023.

Inflasi tahunan pada triwulan I tahun 2023 terutama disebabkan oleh kelompok makanan (khususnya beras), minuman dan tembakau, telur ayam ras, dan rokok kretek filter, kemudian disusul oleh kelompok angkutan terutama angkutan minyak bumi dan penerbangan. Kenaikan harga produk-produk tersebut dipengaruhi oleh pesatnya peningkatan permintaan yang tidak diimbangi oleh peningkatan pasokan, kebijakan kenaikan cukai rokok, serta kebijakan transfer subsidi bahan bakar minyak (BBM). mulai September 2022.

Di sisi lain, kenaikan inflasi tertahan karena turunnya harga daging ayam, cabai merah, dan cabai rawit, karena kondisi pasokan yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Dengan kemampuannya mengendalikan inflasi, Provinsi Sulawesi Selatan jelas dapat diperhitungkan menjadi produsen yang potensial dalam menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang tinggal di IKN karena harga barang/jasa yang ditawarkan bisa dijaga agar tidak terlalu mahal.

c. Nilai Ekspor

Ekspor adalah pembelian negara lain atas barang buatan perusahaan-perusahaan di dalam negeri (Sukirno, 2008: 205). Ekspor penting tidak hanya karena dapat menghasilkan devisa tetapi juga dapat memperlihatkan peningkatan produktivitas perdagangan (Lee dan Sanica, 2015). Hal inilah yang menyebabkan pelbagai negara/daerah berlomba-lomba untuk meningkatkan nilai ekspornya, termasuk Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 5. Perkembangan Nilai Ekspor Sulawesi Selatan Menurut Komoditas, 2021-2023*)

Kelompok Komoditas (HS)	Nilai FOB (Juta US\$)		
	2021	2022	Jan-Mar 2023
Nikel (75)	953,17	1.041,51	363,18
Besi dan Baja (72)	112,34	290,54	99,38
Biji-Bijian Berminyak (12)	129,37	209,29	62,02
Lak, Getah dan Damar (13)	33,07	79,62	21,65
Ikan dan Udang (03)	43,87	63,00	12,79
Garam, Belerang dan Kapur (25)	74,55	61,33	11,46
Daging dan Ikan Olahan (16)	17,21	19,79	8,44
Ampas / Sisa Industri Makanan (23)	0,00	0,00	5,62
Kakao (18)	7,30	4,16	5,59
Buah-buahan (08)	18,98	15,47	4,46
Total 10 kelompok komoditas	1.389,88	1.784,71	594,59
Lainnya	48,72	256,84	8,12
Total Ekspor Sulawesi Selatan	1.438,60	2.041,55	602,71
Total Ekspor Indonesia	231.540,80	291.979,10	67.061,10

*) Nilai ekspor yang dikirim melalui pelabuhan Sulawesi Selatan

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa komoditas ekspor terbesar Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2021 – 2023 adalah Nikel, yang pada tahun 2022 bahkan nilai Free On Board (FOB) mencapai 1.041,51 Juta US\$ atau setara dengan Rp. 150.622.650 Juta, diikuti dengan ekspor besi dan baja pada tempat kedua yang pada tahun 2022 mencapai nilai 290,54 US\$.

Nikel, besi dan baja ini juga merupakan potensi untuk mendukung pembangunan Ibukota Negara. Karena adanya ekspor menunjukkan bahwa kebutuhan di dalam negeri sudah tercukupi. Artinya jika pembangunan IKN membutuhkan ketiga komoditas tersebut

maka dapat disediakan oleh Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 6 di bawah ini menunjukkan negara-negara yang menjadi tujuan ekspor bagi komoditas Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari sepuluh negara tujuan. Importir tertinggi dari komoditas Provinsi Sulawesi Selatan adalah Jepang, yang diikuti dengan Tiongkok dan Taiwan. Hal ini tentu saja menjadi sumber devisa tersendiri bagi Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 6. Perkembangan Nilai Ekspor Sulawesi Selatan Menurut Negara Tujuan, 2021-2023*)

Negara Tujuan (Kode)	Nilai FOB (Juta US\$)		
	2021	2022	Jan-Mar 2023
Jepang (111)	998,66	1.091,63	372,15
Tiongkok (116)	297,44	604,58	192,79
Filipina (123)	16,15	4,54	5,77
Australia (311)	14,19	9,79	4,98
Taiwan (115)	20,77	24,02	4,94
Amerika Serikat (411)	3,72	1,48	3,47
Korea Selatan (114)	17,82	13,31	2,16
Jerman (514)	0,00	0,27	2,03
Timor Leste (391)	10,89	9,20	1,93
Vietnam (131)	3,25	2,89	1,79
Total 10 Negara Tujuan	1.382,90	1.761,71	592,01
Lainnya	55,70	279,84	10,70
Total Ekspor Sulawesi Selatan	1.438,60	2.041,55	602,71
Total Ekspor Indonesia	231.540,80	291.979,10	67.061,10

*) Nilai ekspor yang dikirim melalui pelabuhan Sulawesi Selatan

Sumber: Indikator Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan 2023

d. Fasilitas wisata

Selain beberapa kelebihan diatas, Provinsi Sulawesi Selatan juga memiliki potensi wisata yang luar biasa. Tidak hanya berupa wisata alam, namun juga wisata kuliner yang menggugah selera didukung dengan ketersediaan hotel, penginapan, restoran dan sarana wisata lainnya. Hal ini tentu saja dapat memancing wisatawan mancanegara yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan bagi Provinsi Sulawesi Selatan dan juga sebagai sumber devisa negara.

Tabel 7. di bawah menunjukkan bahwa selama triwulan pertama tahun 2023, Provinsi Sulawesi Selatan sudah kedatangan 3,521 orang wisatawan asing dengan jumlah terbanyak berasal dari Malaysia. Belum lagi jika ditambah dengan wisatawan dalam negeri. Hal ini tentu saja dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menyerap tenaga kerja bahkan menjadi sumber peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 7. Perkembangan Jumlah Wisatawan Mancanegara (Wisman) melalui Pintu Masuk Makassar menurut Kebangsaan, 2023 (Orang)

Kebangsaan	Januari	Februari	Maret
1. Malaysia	628	1090	457
2. China	8	21	17
3. Singapura	82	45	79
4. Amerika Serikat	25	19	20
5. Perancis	19	9	18
6. Jerman	19	23	33
7. Thailand	8	31	2
8. Belanda	7	11	19
9. Spanyol	1	1	8
10. Australia	2	10	10
11. Inggris	9	9	15
12. India	6	9	5
13. Filipina	4	5	1
14. Jepang	9	5	9
15. Italia	6	6	3
16. Switzerland	5	10	2
17. Rusia	3	2	0
18. Polandia	8	1	3
19. Kanada	7	2	4
20. Brunei Darussalam	0	1	1
21. Vietnam	13	1	0
22. Lainnya	221	177	237
Jumlah Indonesia*)	1090	1488	943
	735,95	701,93	809,96

*) melalui semua pintu masuk Indonesia, dalam satuan ribu orang.

Sumber: Indikator Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan 2023

Mengingat lokasi Sulawesi Selatan yang tidak terlalu jauh dari Ibukota Negara yang saat ini masih dalam proses pembangunan, maka potensi wisata yang dimiliki Sulawesi Selatan dapat menjadi destinasi wisata bagi masyarakat yang tinggal di Ibukota Negara. Apalagi dengan adanya pelabuhan di Sulawesi Selatan yang membuat perjalanan dari Kalimantan ke Sulawesi selatan menjadi lebih singkat.

2. Potensi Ekonomi Kota Parepare sebagai Daerah Penyangga Ibukota Negara

Pembangunan IKN tersebut akan berimplikasi kepada terciptanya transformasi ekonomi di Indonesia. Salah satu kerangka dalam visi Pembangunan IKN yakni sebagai penggerak kesetaraan ekonomi bagi kawasan Indonesia bagian Timur. Efeknya akan lebih dirasakan khususnya bagi daerah-daerah penyangga atau daerah terdekat di sekitar Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Timur, Kalimantan Timur. Keberadaan provinsi penyangga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (KAW). Dikatakan oleh Prof Aminudin Ilmar, Sekretaris Badan Kerja Sama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS) bahwa daerah penyangga berperan penting disebabkan daerah ini adalah penyuplai kebutuhan di Nusantara (Lumowa, 2023).

Daerah penyangga IKN, salah satunya adalah Kota Pare-Pare yang secara geografis memiliki jarak cukup dekat dengan letak IKN, sebab hanya dipisahkan oleh selat makassar saja. Kemudian Kota Pare-Pare juga merupakan salah satu Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang meliputi kawasan pemanfaatan umum yaitu untuk: (1) industri (yang berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Selatan) dan Pelabuhan (yang berada di sebagian perairan Provinsi Sulawesi Selatan) serta (2) alur laut yaitu arahan peruntukan ruang laut untuk alur pelayaran yang menghubungkan pelabuhan Pare-Pare dengan Pelabuhan-pelabuhan lain.

Pemerintah Kota Pare-Pare mendukung Pembangunan IKN tersebut, disebabkan Kota Pare-Pare memiliki peluang yang besar dalam membantu mengembangkan Ibu Kota baru selain juga tadi sebagai salah satu KSN. Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan dan kemudian dieksplor oleh Pemerintah Kota Pare-Pare keterkaitannya dengan ekonomi, antara lain dari segi transportasi, pertanian, Sumber Daya Manusia (SDM), perdagangan, pendidikan, pariwisata, kesehatan dan sebagainya.

Bidang transportasi khususnya transportasi laut yang berpotensi untuk dimanfaatkan oleh Kota Pare-Pare adalah Pelabuhan. Pelabuhan yang beroperasi di Kota Pare-Pare sendiri meliputi Pelabuhan Cappa Ujung, Pelabuhan Nusantara, Pelabuhan Lontange dan Pelabuhan Cempae serta dermaga khusus Pertamina (kapal-kapal kargo). Kunjungan kapal di Kota Pare-Pare tahun 2021 terbanyak adalah kapal kargo, diikuti kapal ro-ro/ferry dan kapal penumpang, sedangkan jumlah kunjungan kapal yang paling sedikit adalah kapal tongkang. Selain barang dan orang, Pare-Pare juga pernah mendistribusikan hewan ternak. Namun sudah tidak aktif karena kekurangan modal. Berikut ditampilkan beberapa pelabuhan yang masih aktif digunakan hingga saat ini di Kota Pare-Pare:



Gambar 4. Pelabuhan Cappa Ujung, Pelabuhan Nusantara, Pelabuhan Lontange, dan Pelabuhan Cempae

Sumber: diolah peneliti

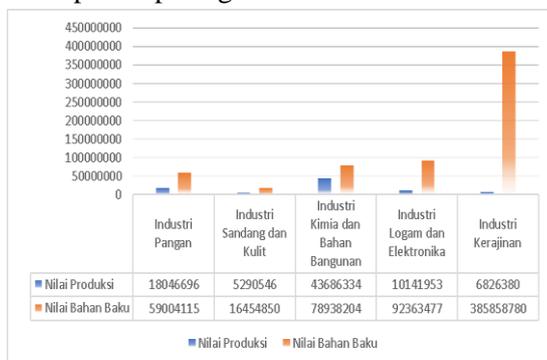
Pelabuhan Cappa ujung ini berfungsi sebagai pelabuhan barang atau kontainer/aktivitas peti kemas. Dan menjadi salah satu Pelabuhan yang berfungsi menopang kawasan timur Indonesia. Pelabuhan Nusantara berfungsi sebagai Pelabuhan utama kapal barang dan penumpang. Pelabuhan Lontange dikenal sebagai Pelabuhan rakyat yang masih menggunakan kapal-kapal tradisional yang digunakan para pedagang untuk mengirim ke Kalimantan. Pelabuhan Cempae adalah Pelabuhan terkecil di Kota Pare-Pare yang diperuntukkan bagi kapal ikan yang akan bongkar muat ikan hasil tangkapan nelayan. Selain itu, ada juga Pelabuhan minyak (Pertamina-tanker).

Kota Pare-pare juga menjadi penyuplai komoditas pertanian atau bahan pangan ke daerah lain. Didukung dengan adanya Pasar Induk Beras yang diperkirakan dapat menampung sampai 100.000 ton. Sedangkan komoditi sayuran dengan jumlah lahan serta produksi terbesar ada di Kota Pare-Pare di Tahun 2022 pada tanaman jagung, diikuti petsai dan bayam. Produksi buah-buahan yang paling mendominasi di Kota Pare-Pare dari tahun 2020 hingga tahun 2023 adalah buah mangga. Selain itu, perkebunan kelapa menjadi satu-satunya yang memiliki luas areal tanaman terbesar dan memproduksi kelapa 36,18 ton di tahun 2021. Bidang peternakan juga memiliki peluang yang cukup besar, karena Kota Pare-pare memproduksi ayam ras dan ayam kampung yang cukup banyak, kemudian disusul oleh sapi dan kambing.

Pendidikan di Kota Pare-Pare juga tersebar dan dapat menjadi pilihan bagi pendatang IKN. Selain daripada lulusan dari sekolah-sekolah yang ada di Kota Parepare dapat berkontribusi dalam proses pembangunan IKN, salah satunya yaitu Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie (ITH). Selain itu, Kota Pare-pare juga memiliki angka pengangguran yang cukup tinggi karena lulusan di perguruan tinggi lebih memilih menetap di Kota Pare-pare dan tidak kembali ke daerahnya dalam rangka mencari pekerjaan disitu. Sehingga, dengan adanya IKN, diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran.

Kota Pare-pare juga memiliki 6 rumah sakit yang memadai baik rumah sakit daerah maupun swasta yang dapat dijadikan alternatif bagi pendatang di IKN, seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Makkasau Parepare, Rumah Sakit Regional dr. Hasri Ainun Habibie, Rumah Sakit RS Sitti Khadijah Pare-Pare, dan sebagainya.

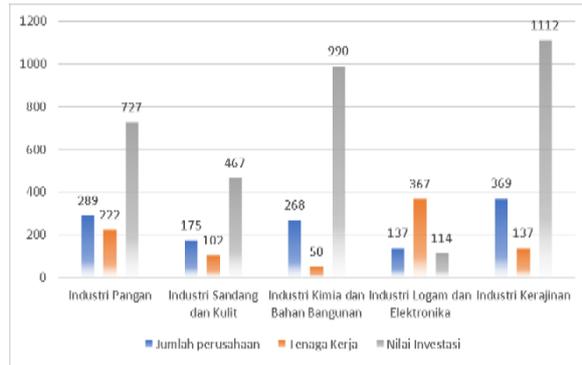
Bidang industri juga memperlihatkan produksi yang besar, yaitu tertinggi pada industri kimia dan bahan bangunan, diikuti industri pangan, industri logam dan elektronika, ditampilkan pada grafik berikut:



Grafik 1. Nilai Produksi dan Nilai Bahan Baku/Bahan Penolong dari Industri di Kota Pare-Pare Tahun 2021

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Pare-Pare, Pare-Pare Dalam Angka 2022

Meskipun produksi pada Industri Kerajinan menjadi yang terendah dibandingkan industri lainnya, namun nilai investasinya di tahun 2021 menjadi yang tertinggi yaitu pada kerajinan emas dan perak, kemudian diikuti oleh industri kimia dan bangunan, industri pangan serta industri lainnya. Lebih jelasnya dilihat pada grafik di bawah ini:



Grafik 2. Jumlah Perusahaan Industri, Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Menurut Sektor di Kota Pare-Pare Tahun 2021

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Pare-Pare

Selain itu, Kota Pare-Pare juga memiliki Kawasan Industri dan Pergudangan Pare-Pare dan Sekitarnya (KIPAS) dan diharapkan dijadikan sebagai tempat pemrosesan bahan agro untuk dibawa ke IKN selain sebagai pusat pergudangan.

Bidang pariwisata Kota Pare-Pare juga diharapkan dapat menarik minat para pendatang di IKN. Kota Pare-Pare memiliki beberapa ? wisata yang cukup baik, seperti wilayah Pantai seperti Pantai Lumpue, Pantai Mattirotasi (Pantai Bibir), Pantai Tonrangeng, Kebun Raya Jompie, Wisata pelestarian terumbu karang tonrangeng, River Ladoma, Sumur Jodoh Soreang, dan sebagainya. Data dari Dinas Kepemudaan, olahraga dan Pariwisata Kota Parepare menunjukkan bahwa di tahun 2021, tamu asing yang mengunjungi wisata di Kota Pare-Pare sejumlah 1.541 jiwa dan tamu domestik sejumlah 839.016 jiwa dengan intensitas paling tinggi di akhir tahun.

Berdasarkan PDRB Kota Pare-Pare, maka bidang yang berkontribusi tinggi dari tahun ke tahun terhadap PDRB adalah perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (tahun 2021 15,97% dari PDRB) serta konstruksi (tahun 2021 sebesar 15,33% dari PDRB) dan kontribusi terendah yakni pada pengadaan listrik dan gas (tahun 2021 sebesar 0,07% dari PDRB).

3. Kesiapan Kebijakan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Daerah Penyangga dalam Pembangunan Ibukota Negara

Kebijakan pembangunan memuat seperangkat rencana jangka panjang/menengah/pendek, program, kegiatan, dan langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan negara. Arah kebijakan pembangunan menjadi pemandu apa yang ingin dicapai dan apa yang perlu dilakukan oleh *stakeholders* untuk mewujudkan tujuan negara. Pemerintah telah menggariskan bahwa kebijakan pembangunan harus disusun secara sistematis, komprehensif, terarah, terpadu, dan fleksibel jika terjadi perubahan lingkungan strategis yang didasarkan atas prinsip keberlanjutan, keadilan, keseimbangan, dan berwawasan lingkungan. Untuk melaksanakan hal tersebut, telah diatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana pembangunan jangka Panjang periode 20 tahun (RPJP/RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah periode 5 tahun (RPJM/RPJMD) yang berpedoman terhadap rencana pembangunan jangka panjang, dan rencana pembangunan tahunan (RKP/RKPD) yang merupakan penjabaran atas rencana pembangunan jangka menengah (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 2004).

Pemerintah Daerah merupakan bagian dari Pemerintah Pusat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 Konstitusi sehingga kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Kebijakan pembangunan jangka panjang yang ditetapkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan (RPJPD) harus mengacu pada rencana jangka panjang Pemerintah Pusat (RPJPN). Kemudian arah kebijakan pembangunan jangka menengah Provinsi Sulawesi Selatan (RPJMD) harus berpedoman pada arah pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) yang telah ditetapkan dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN). Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana strategis (Renstra) Perangkat daerah

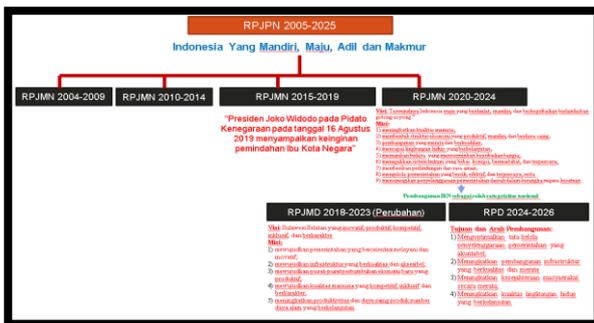
(Dinas/Badan/Kantor). Selanjutnya rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dijabarkan kedalam rencana pembangunan tahunan daerah (RKPD).

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan kebijakan arah pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan sebagai pemandu apa yang akan dilaksanakan ke depan. Arah kebijakan pembangunan jangka Panjang hingga tahun 2025 sebagaimana termuat dalam Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028. Adapun kondisi ideal (visi) yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan hingga tahun 2025 adalah “Menjadi Provinsi Terkemuka di Indonesia dengan Pendekatan Kemandirian Lokal yang Bernafaskan Keagamaan”. Visi tersebut mengacu pada visi pembangunan nasional yakni “Menjadi Negara yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur).

Kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara pertama kali disampaikan Presiden Joko Widodo pada sidang kenegaraan bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pada tanggal 16 Agustus 2019 sekaligus menjadi salah satu major project dalam RPJMN 2020-2024 yang dimuat dalam Perpres 18 Tahun. Harapannya dengan kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara dapat meningkatkan pembangunan dan pemerataan wilayah. Pembangunan yang selama ini masih dominan di Pulau Jawa, dengan ditetapkannya kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara ke Pulau Kalimantan diharapkan dapat mendorong diversifikasi ekonomi dan memacu pembangunan.

Pada tahun 2021, tepatnya pada tanggal 8 Februari 2021, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan perubahan (revisi) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 yang ditetapkan melalui Peraturan daerah

Nomor 1 Tahun 2021. Perubahan ini dilakukan dalam rangka mensinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, mengakomodir ketentuan perencanaan penganggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019, dan penyesuaian kembali pelaksanaan tugas perangkat daerah sebagai dampak perubahan susunan perangkat daerah yang ditetapkan dalam Peraturan daerah Nomor 11 Tahun 2019. Dalam revisi *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023* ini tidak menyinggung terkait kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara tetapi lebih kepada penyesuaian indikator dan target kinerja perangkat daerah terutama dikarenakan terjadinya Pandemi Covid-19. Meskipun kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara telah disepakati bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 pada tanggal 15 Februari 2022, arah kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, baik dalam revisi *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023* maupun dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, tidak ada yang secara khusus menyinggung kebijakan pemindahan IKN. Hal ini diperkuat pula dari hasil FGD yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2023.



Gambar 5. Analisis Sinergitas Perencanaan Pembangunan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Pembangunan Ibu Kota Negara

Sumber: Tim Peneliti, 2023

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak memasukkan kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara sebagai salah satu isu strategis pembangunan bagi Provinsi Sulawesi Selatan, baik itu dalam *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023* maupun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026.

Kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara telah ditetapkan dan dikuatkan dengan penetapan Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara, 2022a). Proses pembangunannya pun terus berjalan. Pejabat pengelola Ibu Kota Negara telah ditunjuk. Oleh karena itu, Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang berbatasan dengan lokasi Ibu Kota Negara yang baru (Nusantara) seyogyanya dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menghubungkan apa yang dibutuhkan oleh Ibu Kota Negara dan apa yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Selatan guna membantu kebutuhan Ibu Kota Negara. Berbagai kebutuhan dan apa yang bisa disediakan oleh Pemerintah Provinsi Selatan antara lain: bahan pangan, bahan konstruksi, tenaga kerja, layanan pendidikan, layanan kesehatan, dan pariwisata.

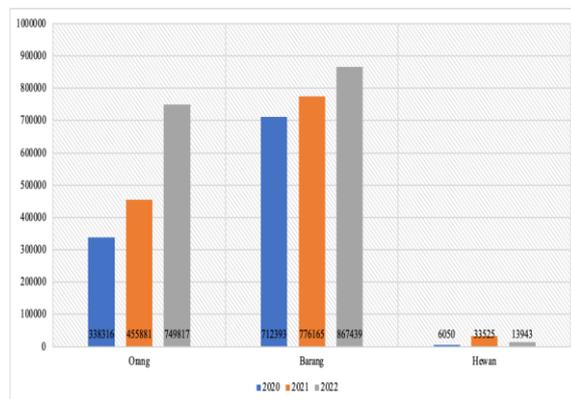
4. Analisis Kesiapan Kebijakan Kota Parepare sebagai Daerah Penyangga dalam Pembangunan Ibukota Negara

Salah satu daerah kabupaten/kota yang memiliki akses langsung dan intensitas tinggi dalam hubungannya dengan Kalimantan Timur adalah Kota Parepare. Intensitas tersebut disebabkan adanya Pelabuhan Nusantara Kota Parepare yang menjadi sarana transportasi utama untuk penumpang dan barang, dari dan menuju ke Kalimantan Timur. Pelabuhan Parepare merupakan salah satu pelabuhan yang cukup sibuk lalu lintas kapalnya karena menjadi salah satu gerbang kedatangan berbagai jenis kapal seperti kapal Pelni, Sabuk Nusantara, Kapal Pesiar hingga kapal-kapal barang dan kapal-kapal rakyat.

Selain Pelabuhan nusantara, Kota Parepare memiliki Pelabuhan lain, untuk membagi beban muatan hewan/ternak, sandang dan lain-lain, yaitu Pelabuhan Cappa Ujung Pelabuhan Lontangnge, dan Pelabuhan Khusus yang digunakan oleh Pertamina. Pelabuhan Nusantara berfungsi sebagai Pelabuhan Penumpang, Pelabuhan Cappa Ujung berfungsi sebagai Pelabuhan Barang/Kontainer. Sedangkan Pelabuhan Lontangnge berfungsi sebagai Pelabuhan Rakyat.

Pada tataran empiris, kebijakan mengenai pemindahan ibukota ke IKN ternyata menyebabkan adanya peningkatan kuantitas penduduk, barang, dan ternak yang dimuat ke Kalimantan Timur dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir, sejak kebijakan pemindahan ibukota negara disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Secara rinci dapat dilihat pada table berikut:

Grafik 3. Bongkar Muat Masyarakat, Barang, dan Ternak di Pelabuhan Parepare



Sumber: diolah oleh peneliti dari sumber utama Pelabuhan Nusantara Parepare, 2023.

Grafik 3 di atas menunjukkan bahwa terhitung sejak Presiden Jokowi mengumumkan pemindahan Ibukota Nusantara, pergerakan orang dan barang dari dan ke Kalimantan Timur melalui Pelabuhan Parepare setiap tahun meningkat. Pergerakan tersebut oleh Pejabat Pelabuhan Parepare dikatakan didominasi oleh pedagang dan pekerja proyek pembangunan seperti buruh kasar dan tukang masak yang secara resmi bekerja di proyek IKN dan masyarakat yang ingin membuka usaha warung dan rumah makan di daerah sekitar proyek. Selain itu, peningkatan lalu lintas barang juga oleh pengelola Pelabuhan berupa sayur mayur,

beras, dan pakaian yang meningkat sekitar 150 persen.

Kondisi ini juga perlu penyesuaian kebijakan dalam rangka merespon pembangunan IKN seperti halnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini, dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Parepare Tahun 2018-2023, pembangunan Kota Parepare diprioritaskan pada sector pariwisata dan Pendidikan. Secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 8. Program Prioritas Pembangunan Kota Parepare (Program Walikota)

No	Sektor	Program Walikota
1	Pariwisata	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepariwisataaan Program Promosi dan Pengembangan destinasi Wisata dan Even Wisata Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisataaan
2	Pendidikan	Program Fasilitas dan Pembinaan Perguruan Tinggi Negeri

Sumber: RPJMD Kota Parepare 2018-2023.

Salah satu program pariwisata Kota Parepare yang berkaitan dengan pembangunan IKN adalah dengan wisata olahraga. Kebijakan kepariwisataan ini berupa negosiasi dengan pemerintah pusat dan manajemen PSM (Persatuan Sepakbola Makassar) untuk menjadikan Stadion Gelora BJ Habibie sebagai *homebase* PSM. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga bahwa kebijakan relokasi *homebase* tersebut diusahakan mengingat selain posisi Kota Parepare yang menjadi kota transit dan jalur utama trans Sulawesi, komposisi penduduk yang ada di Kalimantan Timur tepatnya di IKN adalah suku bugis makassar (sebesar 25-30 persen). Jika penduduk yang ada di IKN nantinya butuh wisata olahraga dan kuliner khas bugis-makassar, maka Kota Parepare adalah

daerah dengan akses mudah yang bisa dijangkau.

Selain wisata olahraga dan kuliner, pemerintah Kota Parepare tengah mengembangkan potensi pariwisata berupa hutan kota yang ada di Kelurahan Jompie. Hutan Kota tersebut sebelumnya telah ada dan saat ini dalam proses pembangunan infrastruktur yang ada di dalam hutan dengan pendampingan Kementerian Pariwisata dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memenuhi standar hutan kota sebagai tempat pariwisata. Bahkan lebih jauh, pemerintah Kota Parepare saat ini memiliki rencana membangun wisata belanja dan wisata lainnya untuk melihat potensi penduduk yang akan mendiami IKN (tahap pertama sebanyak 16.991 PNS dari K/L).

Program prioritas daerah dalam bidang Pendidikan berkaitan dengan pembangunan IKN adalah program fasilitasi pembangunan perguruan tinggi. Program tersebut berupa pendirian perguruan tinggi Institut Teknologi Habibie (ITH) yang dimulai sejak tahun 2016 dan saat ini sudah mulai beroperasi. Meskipun kebijakan tersebut sudah ada sejak tahun 2017, tetapi dengan kebijakan pemindahan ibukota ke IKN, pemerintah Kota Parepare mengusulkan kepada manajemen ITH untuk penambahan program studi yaitu sistem informasi. Kebijakan ini, menurut pendapat Kepala Bappeda, dimaksudkan selain sebagai sarana alternatif perkuliahan yang ada di Makassar, tetapi juga proyeksi terhadap kebutuhan sumber daya manusia yang ada di IKN (Wargadinata et al., 2022). Hal ini dilakukan karena komposisi mahasiswa ITH saat ini adalah masih masyarakat Kota Parepare dan daerah sekitarnya.

Sektor Kesehatan, pemerintah daerah Kota Parepare juga mencanangkan konsep *medical tourism*. Konsep ini oleh Kepala Bappeda Kota Parepare, terkait dengan penyediaan layanan Kesehatan yang berkualitas yang juga sekaligus menjadi objek wisata tersendiri. Saat ini, telah terbangun dan beroperasi RS. dr. Hasri Ainun Habibie yang menjadi rumah sakit regional Sulawesi Selatan dengan standar pelayanan Kesehatan yang tidak

jauh berbeda dengan RS. dr. Wahidin yang ada di Kota Makassar. Diharapkan masyarakat yang ada di daerah Sulawesi Barat dan kabupaten/kota yang berada di selatan Parepare, termasuk masyarakat di Kalimantan Timur, akan memanfaatkan fasilitas rumah sakit ini. Potensi pemanfaatan itu dapat dilihat dari posisi RS. dr. Hasri Ainun Habibie yang berada di pinggir pantai Parepare dengan pemandangan yang langsung menghadap ke teluk Parepare.

Selain itu, Kota Parepare sebagai kota transit juga sebagai kota penghubung (*connector city*) antara Kalimantan Timur dengan Sulawesi Selatan menjadikan semua bahan sandang dan pangan yang berasal dari bagian utara Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Enrekang penghasil sayur mayur, Kabupaten Pinrang sebagai penghasil beras, dan Kabupaten Barru dan Kabupaten Sidrap sebagai penghasil Sapi dan Unggas, yang menjadi sumber utama pasokan ke Kalimantan Timur, melalui Pelabuhan Parepare. Oleh sebab itu, dengan adanya pembangunan IKN, hal ini perlu mendapatkan kebijakan khusus dari pemerintah daerah. Kebijakan khusus ini ditujukan menghindari adanya monopoli usaha yang sudah ada, melainkan juga dampak yang dihasilkan dari pembangunan IKN juga dirasakan oleh masyarakat Kota Parepare. Selain itu, perangkat kebijakan juga ditujukan untuk menghasilkan aturan main yang memungkinkan adanya Kerjasama G-G (*government to government*) atau G-B (*government to business*), yang saat ini pola Kerjasama B-B (*business to business*) yang beroperasi. Sebab jika peran pemerintah minim dalam hal tersebut, maka akan mengakibatkan dominasi pasar/bisnis (monopoli) yang bermuara pada pelebaran kesenjangan pendapatan masyarakat (Todaro, 2006).

SIMPULAN

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki potensi ekonomi yang cukup besar sebagai daerah penyangga Ibukota Negara, dapat dilihat berdasarkan pertumbuhan ekonomi, PDRB, Nilai ekspor, kemampuan mengendalikan inflasi dan fasilitas wisata yang memadai.

Keempat hal ini menunjukkan bahwa bukan hanya Sulawesi Selatan bisa menjadi produsen untuk memenuhi kebutuhan Ibukota Negara namun juga potensial untuk mengembangkan kerjasama lain yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Kota Pare-Pare sebagai salah satu daerah penyangga Ibu Kota Negara (Nusantara) memiliki peluang besar yang dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk mendukung atau memenuhi kebutuhan dalam proses pembangunan IKN, yang akan berdampak pada perekonomian daerah serta masyarakat di Kota Pare-Pare. Hal ini bisa dilihat dari ketersediaan akses perhubungan/transportasi (4 pelabuhan, dermaga) yang memadai, komoditi pertanian, peternakan, tenaga kerja atau SDM, perdagangan, pendidikan dan kesehatan serta destinasi wisata.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai daerah penyangga tidak menempatkan kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara sebagai salah satu isu strategis pembangunan daerah (RPJPD/RPJMD/RPD) sehingga berbagai peluang tidak bisa dimanfaatkan secara optimal. Kebijakan pembangunan daerah lebih diarahkan untuk mengatasi permasalahan internal dan mengoptimalkan seluruh potensi untuk dikirim secara nasional (terutama untuk Kawasan Timur Indonesia) dan internasional (ekspor). Pemenuhan kebutuhan Ibu Kota Negara lebih didominasi peran swasta. Kesiapan kebijakan Kota Parepare sebagai daerah Penyangga Ibukota Negara tidak dilakukan secara khusus melainkan dengan adanya keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan wilayah dan tata ruang nasional yang menjadikan Kota Parepare sebagai kota jasa, kota industri, dan kota penghubung (*connector city*).

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Lembaga Kajian Strategik Pemerintahan IPDN atas bantuan dana penelitian yang diberikan. Selain itu, terima kasih kepada pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah daerah

Kota Parepare atas data dan informasi yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, K. (2017). Perubahan Geopolitik dan Ketahanan Nasional: Sebuah Penjelajahan Teoretikal. *Jurnal Lemhanas Republik Indonesia*, 5(1).
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2021). *Naskaha Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara*.
- Daus. (2023). *Kabag BPJ Kutim Sebut Pihaknya Terus Dorong Produk-Produk Lokal Masuk di Katalog Elektronik*. <https://www.kutaitimurkab.go.id/>.
- Djayanti, H. D., Sumertha, I. G., & Utama, A. P. (2022). Potensi Konflik Sosial dalam Pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia. *Jurnal Damai Dan Resolusi Konflik*, 8(1).
- Fadli, A., & Alexander, H. B. (2022). Pembangunan IKN diperkirakan Serap 21 Juta Ton Semen. <https://www.kompas.com/>.
- Fauzan, R. (2022). *IISIA Estimasi Kebutuhan Baja Proyek IKN Capai 9,3 Juta Ton*. <https://ekonomi.bisnis.com/>.
- Hasibuan, R. R. A., & Aisa, S. (2020). Dampak dan Resiko Perpindahan Ibu Kota Terhadap Ekonomi di Indonesia. *Jurnal At-Tawassuth*, V(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30829/ajei.v5i1.7947>
- Humas Ibu Kota Negara. (2022). *Jokowi: Pemindahan Ibu Kota Bagian Transformasi Indonesia*. Ikn.Go.Id.
- Humas Sekretariat Negara. (2019). Presiden Jokowi Tegaskan Rencana Pemindahan Ibu Kota di Hadapan Anggota Dewan. *Setneg.Go.Id*.
- Hutasoit, W. L. (2018). Analisa Pemindahan Ibukota Negara. *DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Dan Budaya*, 39(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.31293/dk.v39i2.3989>
- Ismanto, A., Pramudji, P., Kusworo, H., Waluyo, H., Wicaksono, A., Nurfuadah, & Diana, P. (2022). *Pembangunan Ibu Kota Baru & Stabilitas Politik Nasional*. CV. Bhamana Indonesia Gemilang.
- Jhingan, M. L. (2013). *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan* (1st ed.). Rajawali Pers. Kementerian Komunikasi dan

- Infomatika. (2019). *Ibu Kota Negara Pindah ke Wilayah Penajam pasir Utara dan Kutai Kartanegara*. Kominfo.Go.Id.
- Kodir, A., Hadi, N., Astina, I. ., Taryana, D., Ratnawati, N., & Idris. (2021). The dynamics of community response to the development of the New Capital (IKN) of Indonesia. *Development, Social Change and Environmental Sustainability*. <https://doi.org/DOI> 10.1201/9781003178163-1
- Maxwell, J. A. (2012). *Qualitative Research Design: An Interactive Approach*. In *SAGE Publication* (3rd Editio). SAGE Publication.
- Mulyono, H. (2017). Geostrategi Indonesia dalam Dinamika Politik Global dan Regional. *Jurnal Lemhanas Republik Indonesia*, 5(1).
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (2004).
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, (2022).
- Pratiwi, F. S. (2023). Penduduk IKN Diproyeksikan Mencapai 1,91 Juta Jiwa Pada Tahun 2045. <https://Dataindonesia.Id/>.
- Putra, A. P. (2021). *DPR Terima Surat Presiden Soal RUU Ibu Kota Negara*. Cnnindonesia.Com.
- Riyandi, A. (2022). *Mengapa IKN harus pindah ke Kaltim?* Kaltimprov.Go.Id.
- Saldaña, J. (2009). *The coding manual for qualitative researchers*. SAGE Publication.
- Saraswati, M. K., & Adi, E. A. W. (2022). Pemindahan Ibu Kota Negara ke Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Analisis SWOT. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 6(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v6i2.3086>
- Todaro, M. P. (2006). Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga. In *Economic Development*. <https://doi.org/2003>
- Triyatna, S. O. (2022). Kebutuhan Tenaga Kerja Konstruksi IKN Mencapai 1,14 Juta Orang. <https://www.kompas.id/>.
- Wargadinata, E., Aly, E. S., & Alma'arif, A. (2022). Evaluation of Jakarta Province in Information and Technology Management. *Jurnal Bina Praja*, 14(3), 453–464. <https://doi.org/10.21787/jbp.14.2022.453-464>



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license